

# JENDELA

## Pendidikan dan Kebudayaan

LX/Juni - 2022

09 | Satuan Biaya BOP PAUD Tahun 2022 Disesuaikan dengan Karakteristik dan Kebutuhan Daerah

15 | Kolaborasi Pemerintah Ciptakan Fleksibilitas dalam Pengelolaan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

25 | Transformasi Kebijakan BOS 2020 dan 2021

## AKSELERASI DAN PENINGKATAN PENDANAAN PAUD DAN PENDIDIKAN KESETARAAN



# Daftar Isi

- 
- |    |   |   |    |   |  |
|----|---|---|----|---|--|
| 4  | — | <b>Salam Mas Menteri</b>  | 25 | — | <b>Transformasi Kebijakan BOS 2020 dan 2021</b>  |
| 6  | — | <b>Sekilas Kemendikbudristek</b>  |    |   | Dr. Elih Sudiapermana, M.Pd  |
| 9  | — | <b>Satuan Biaya BOP PAUD Tahun 2022 Disesuaikan dengan Karakteristik dan Kebutuhan Daerah</b>                                 | 28 | — | <b>Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Dorong Pengembangan Diri Satuan Pendidikan Tanah Rencong</b> |
| 12 | — | <b>Penerima BOP Kian Dipermudah Dana Bantuan Ditransfer Langsung ke Rekening Satuan Pendidikan</b>                            | 30 | — | <b>Resensi Buku Kisah Inspiratif dari Mahasiswa Program Kampus Mengajar</b>  |
| 15 | — | <b>Kolaborasi Pemerintah Ciptakan Fleksibilitas dalam Pengelolaan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan</b>                      | 32 | — | <b>Festival Film Indonesia 2022 Angkat Tema Perempuan</b>  |
| 18 | — | <b>ARKAS, Aplikasi Tunggal bagi Sekolah untuk Perencanaan dan Pelaporan Dana BOS</b>  | 35 | — | <b>G20 Bidang Kebudayaan Jalan Kebudayaan untuk Hidup yang Berkelanjutan</b>   |
| 21 | — | <b>Kemendagri Dukung Integrasi ARKAS dan SIPD</b>   | 37 | — | <b>Mengulik Sekolah Rumah di Indonesia Ditilik dari Sisi Legalitas dan Pendekatannya</b>                             |
| 23 | — | <b>Soal Sering Ditanya (FAQ) Akselarasi dan Peningkatan Pendidikan Pendanaan BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan</b> | 39 | — | <b>IISMA Edisi Vokasi: Upaya Membentuk Mahasiswa Vokasi yang Berdaya Saing Global</b>                                |
|    |   |   | 41 | — | <b>Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu</b>  |

Pada pertengahan Februari 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar episode Keenam Belas: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan.

Ada empat fokus kebijakan dari Merdeka Belajar episode ke-16 yang dibahas lengkap pada rubrik **Fokus** edisi kali ini. Tidak lupa Jendela juga menampilkan pendapat dari praktisi yang turut ambil bagian dalam praktik pendidikan nonformal, yakni PAUD dan pendidikan kesetaraan.

Selanjutnya pada rubrik **Resensi Buku**, redaksi suguhkan buku berjudul “Pecalang : Kearifan Lokal Hukum Adat Bali”. Buku setebal 196 halaman ini bisa menjadi bacaan menarik untuk mengetahui pengalaman dan kisah inspiratif dari mahasiswa program Kampus Mengajar.

Sementara itu, pada rubrik **Seputar Film Indonesia** kali ini, *Jendela* menghadirkan artikel peringatan Hari Film Nasional 2022 bersamaan dengan peluncuran Festival Film Indonesia (FFI) 2022 yang mengangkat tema “Tema Perempuan: Citra, Karya, dan Karsa.

Pada rubrik **Kebudayaan**, pembaca dapat menikmati artikel tentang kepemimpinan Kemendikbudristek dalam G20 bidang kebudayaan. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri Kebudayaan G20 atau G20 Ministerial Meeting on Culture, Kemendikbudristek menawarkan sebuah konsep atau tema kepada dunia, yaitu “Jalan Kebudayaan untuk Hidup yang Berkelanjutan” atau “Culture for Sustainable Living”.

Di rubrik **Kajian**, ada suguhan artikel tentang keberadaan sekolah rumah (homeschooling) yang menjadi alternatif pendidikan nonformal bagi peserta didik..

Terakhir, rubrik yang tidak boleh dilewatkan ada **Bangga Berbahasa Indonesia**, yang kali ini membahas tentang sejarah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu serta internasionalisasi bahasa Indonesia.

Redaksi ucapkan terima kasih atas dukungan para pembaca setia Jendela. Jangan lupa ikuti akun media sosial Jendela di Facebook Majalah Jendela Dikbud, juga dan unduh aplikasi Majalah Jendela di Play Store dan App Store. Selamat membaca!

Redaksi

## REDAKSI

**Pelindung** | Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim  
**Penasihat** | Sekretaris Jenderal, Suharti  
**Pengarah Konten** | Staf Khusus Mendikbudristek, M. Heikal  
**Penanggung Jawab** | Anang Ristanto  
**Pemimpin Redaksi** | Azis Purwanto  
**Redaktur Pelaksana** | Aline Rogeleonick  
**Staf Redaksi** | Desliana Maulipaksi, Seno Hartono, Prani Pramudita, Prima Sari, Dwi Retnawati, Andrew William Fangidae, Denis Sugianto, An-an Anwar Hikmat, Aline Rogeleonick, Nur Widiyanto, Denty Anugrahmawaty, Devy Putri Puspitasari.  
**Editor** | Desliana Maulipaksi  
**Desain dan Layout** | Susilo Widji P, Shahwin Purnomo Aji, Sigit Supriyadi  
**Fotografi** | Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM)



### Sekretariat Redaksi

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM)  
Kompleks Kemendikbudristek, Gedung C Lantai 4,  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta  
Telepon: 021-5711144 Pes. 2413

🌐 kemdikbud.go.id

f kemdikbud.RI

🐦 @kemdikbud\_RI

📺 KEMENDIKBUD RI

📷 kemdikbud.RI

📺 kemdikbud.RI

📖 jendela.kemdikbud.go.id



# Salam Mas Menteri

**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan memiliki peran yang sangat menentukan masa depan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.**

**Oleh karena itulah kami di Kemendikbudristek terus memprioritaskan upaya peningkatan kualitas satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan agar mampu menghadirkan pembelajaran yang relevan dan menjamin masa depan peserta didik.**

**S**alah satu aspek krusial yang memengaruhi mutu satuan pendidikan adalah ketersediaan dana dukungan dari pemerintah. Sejak pertama kali diluncurkan pada 2005, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah membantu satuan pendidikan di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam perjalanannya, kami di Kemendikbudristek terus meningkatkan kualitas program ini, termasuk dengan melakukan transformasi pada kebijakan penentuan besaran, pengiriman, dan pemanfaatan dana BOS.

Merdeka Belajar Episode 16 tentang Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan yang kami luncurkan pada 16 Februari 2022 merupakan kelanjutan dari Perubahan Mekanisme BOS sebagai Merdeka Belajar Episode 3 yang kami hadirkan dua tahun lalu.

Dengan adanya transformasi kebijakan ini, Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan besarnya disesuaikan dengan Indeks

Kemahalan Daerah (IKD), ditransfer langsung ke rekening sekolah, dan dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan, termasuk melengkapi daftar periksa pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan membayar honor guru honoror.

Selain itu, kami juga menghadirkan aplikasi ARKAS dan MARKAS sebagai platform satu pintu yang membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam melaporkan dan mengawasi penggunaan dana BOS. Terobosan ini kami hadirkan untuk mewujudkan sistem penganggaran yang jauh lebih efisien, efektif, dan akuntabel bagi PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

Saya yakin semua terobosan terkait mekanisme BOS dan BOP ini akan mengakselerasi transformasi pendidikan yang sedang kita gencarkan bersama melalui gerakan Merdeka Belajar. Bersama kita bergerak serentak meningkatkan kualitas PAUD dan Pendidikan Kesetaraan demi terwujudnya cita-cita Merdeka Belajar, pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. (\*)





4 | 4 | 2022

Museum Nasional Luncurkan

## Ruang Pamer dengan Instalasi Teknologi Imersif



**M**useum Nasional Indonesia kini mengembangkan Ruang ImersifA yang memanfaatkan teknologi imersif untuk menciptakan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Teknologi imersif merupakan sebuah teknologi informasi, di mana seluruh dinding dan lantai di sebuah ruangan diproyeksikan gambar bergerak yang dilengkapi dengan

tata suara, sehingga pengunjung dapat merasakan pengalaman yang unik dan menarik.

Ruang ImersifA merupakan instalasi permanen video mapping dengan ukuran 12 m x 21 m. Pada setiap sesi pertunjukan, sajian video mapping berdurasi 30 menit yang diproyeksi dengan sudut 360°, termasuk lantai. Pengunjung yang menyaksikan akan merasakan sensasi seolah-olah ada di dalam video. Dinding yang mengelilingi dan lantai yang dipijak menjadi layar yang memutar pertunjukan.

Konten ImersifA menampilkan sejarah Indonesia dalam konsep alam, masyarakat, sejarah dan budaya dari masa ke masa. Di ruang ini, pengunjung akan berpetualang, mengalami dunia dari sudut pandang pelaku sejarah. **(DES/ Sumber: kemdikbud.go.id)**

13 | 4 | 2022

## Delegasi 10 Negara Siapkan Penyelenggaraan Olimpiade Komputer Internasional di Yogyakarta

**P**usat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kemendikbudristek menerima 17 orang peserta dari 10 negara pada persiapan olimpiade internasional di bidang komputer, International Olympiad in Informatics (IOI) 2022, di Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung pada 11 s.d. 15 April 2022 ini, merupakan persiapan untuk penyelenggaraan IOI 2022 yang akan digelar Agustus mendatang.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Puspresnas, Asep Sukmayadi mengatakan, penyelenggaraan IOI di Indonesia tahun ini merupakan hasil kerja sama berbagi pihak, terutama Puspresnas Kemendikbudristek yang didukung oleh Asosiasi Alumni Tim Olimpiade Komputer Indonesia. Kesepuluh negara yang hadir di Yogyakarta merupakan negara-negara yang termasuk dalam international committee, yaitu Australia, Singapura, Indonesia, Hungaria,



Mesir, Latvia, Brazil, Macedonia, Chile, dan Azerbaijan.

Pada IOI tahun 2018 di Tsukuba, Jepang, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan IOI ke-34. Winter Meeting dihadiri oleh International Committee (IC), International Technical Committee (ITC), International Scientific Committee (ISC) dan panitia penyelenggara. **(DES/ Sumber: kemdikbud.go.id)**

18 | 5 | 2022

## Kemendikbudristek Dorong Berkembangnya Komunitas Sains Berbasis STEM di Satuan Pendidikan

Sebagai upaya akselerasi nilai tambah untuk pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (P4TK IPA) Kemendikbudristek menggelar Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education Leadership.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril mengatakan, pembelajaran STEM memperlihatkan kepada peserta didik bagaimana konsep-konsep, prinsip-prinsip sains, teknologi, rekayasa, dan matematika digunakan secara terintegrasi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang memberikan manfaat untuk kehidupan manusia.



Kepala P4TK IPA, Enang Ahmadi, mengatakan, terdapat 20 sekolah di kota/kabupaten terpilih di Indonesia yang menjadi sekolah percontohan (nuclei school). Pendampingan akan dilakukan dalam empat siklus sepanjang Maret hingga April 2022 secara hibrida dengan pendamping yang telah dilatih oleh P4TK IPA dan pengamat (observer) dari unsur Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) setempat serta pihak National Institute of Education (NIE) Singapura. **(DES/ Sumber: kemdikbud.go.id)**

4 | 5 | 2022

## Enam Siswa Indonesia Siap Unjuk Gigi di Ajang Internasional Regeneron ISEF 2022

Tahun ini Indonesia mengirim tiga tim yang terdiri atas enam talenta muda untuk bertanding dalam ajang International Science and Engineering Fair (ISEF) 2022. Ajang ini diselenggarakan secara hibrida di Atlanta, Georgia, pada tanggal 7-13 Mei 2022.

International Science and Engineering Fair (ISEF) merupakan pameran dan lomba penelitian sains tahunan terbesar yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat. Tahun ini tim Indonesia berkompetisi dengan 1.700 tim dari 80 negara. Enam peserta dari Indonesia merupakan para peraih medali emas dalam Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KoPSI) tahun 2021.

Peserta dari bidang Matematika, Sains, dan Teknologi yaitu Putri Adinda Irmayanti dan Nadia Aulia asal SMAN 1 Nunukan,

Kalimantan Utara, yang mengetengahkan karya "Penerapan Konsep

Transformasi Geometri pada Batik Urungauwit". Berikutnya, peserta dari bidang Fisika Terapan dan Rekayasa yaitu Zaki Zaidan Akbar dan Atya Danastri Masantika asal SMAN 3 Malang, Jawa Timur, dengan karya "Recover-V (Remotely Controlled Reefs Observer Vehicle) Rancang Bangun Torpedo-Shape Rov sebagai Upaya dalam Melestarikan Terumbu Karang di Indonesia. Kemudian dari bidang Ilmu Sosial dan Humaniora, pesertanya adalah Michelle Angelica Aventha Suharly dan Michelle Sagita Gurning asal SMAN 81 Jakarta, dengan karya "Upaya Penurunan Stres Siswa SMA Negeri 81 Jakarta Menggunakan Autonomous Sensory Meridian Response". **(DES/ Sumber: kemdikbud.go.id)**





### Merdeka Belajar 1

Transformasi pendidikan dasar dan menengah dilakukan dengan: mengubah UN menjadi Asesmen Nasional, mengganti USBN dengan US, menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan menyesuaikan kuota jalur berprestasi PPDB berbasis zonasi.

### Merdeka Belajar 2

Kampus Merdeka, yaitu transformasi pendidikan tinggi dengan memberikan: kemudahan dalam pembukaan studi baru, penyederhanaan akreditasi PT, kemudahan untuk menjadi PTN BH, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.

### Merdeka Belajar 3

Perubahan mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi lebih fleksibel melalui: transfer dana BOS langsung ke rekening sekolah, fleksibilitas penggunaan dana BOS, peningkatan satuan biaya per siswa dalam dana BOS, dan perbaikan sistem pelaporan BOS untuk transparansi dan akuntabilitas.

### Merdeka Belajar 4

Organisasi Penggerak, organisasi kemasyarakatan semakin terlibat dalam membantu sekolah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.

### Merdeka Belajar 6

Transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi melalui pemberian: insentif untuk PTN berdasarkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), dana padanan (matching fund) untuk kerja sama dengan mitra, dan Dana kompetitif (competitive fund) program kompetisi Kampus Merdeka.

### Merdeka Belajar 5

Program Guru Penggerak, program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang mewujudkan SDM unggul Indonesia.

### Merdeka Belajar 7

Program Sekolah Penggerak, mengembangkan sekolah-sekolah katalis melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan intervensi yang holistic.

### Merdeka Belajar 8

Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK), penyaluran pendidikan vokasi dengan dunia kerja untuk mencetak tenaga kerja atau wirausahawan lulusan SMK.

### Merdeka Belajar 9

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka, beasiswa kuliah untuk siswa dari keluarga miskin dengan menaikkan alokasi biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup.

### Merdeka Belajar 10

Perluasan Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yaitu: beasiswa Kampus Merdeka; beasiswa bagi dosen, guru, dan tenaga kependidikan; beasiswa program vokasi dan program prestasi; dan beasiswa kebudayaan.

### Merdeka Belajar 11

Kampus Merdeka Vokasi, transformasi pendidikan vokasi melalui: Dana Kompetitif (program SMK D-2 jalur cepat dan program peningkatan prodi D-3 menjadi Sarjana Terapan atau D-4) dan Dana Padanan dengan program penguatan pusat unggulan teknologi.

### Merdeka Belajar 12

Sekolah Aman Berbelanja bersama SIPLah melalui terobosan: pendokumentasian transaksi secara elektronik, efisiensi anggaran dengan harga yang kompetitif dan opsi beragam, dan partisipasi pelaku UMKM di berbagai daerah.

### Merdeka Belajar 13

Merdeka Berbudaya dengan kanal Indonesiana, menghadirkan kanal media yang bertujuan mewadahi, mengintegrasikan, dan mempromosikan karya serta ekspresi budaya Indonesia.

### Merdeka Belajar 14

Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual: upaya mencegah terjadinya kekerasan seksual dan memberi perlindungan bagi para korban tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi.

### Merdeka Belajar 16

Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan: reformasi kebijakan dengan menyesuaikan nilai satuan BOP PAUD sesuai dengan karakteristik daerah, penyaluran langsung ke satuan pendidikan, dan penggunaan dana yang fleksibel.

### Merdeka Belajar 18

Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana, menjamin ketersediaan dana untuk kemajuan sektor kebudayaan secara keseluruhan.

### Merdeka Belajar 17

Revitalisasi Bahasa Daerah, upaya menjaga eksistensi bahasa yang terancam punah dengan tiga model revitalisasi.

### Merdeka Belajar 15

Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar, fokus pada pertumbuhan dan perkembangan anak dengan mendorong guru mengembangkan diri dan berbagi praktik baik.

### Merdeka Belajar 20

Mendorong kolaborasi aktif praktisi ahli dengan dosen agar tercipta pertukaran ilmu dan keahlian yang mendalam dan bermakna antarsivitas akademika di perguruan tinggi dan profesional di dunia kerja.

### Merdeka Belajar 19

Rapor Pendidikan Indonesia, platform yang menyajikan hasil Asesmen Nasional untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk mempelajari kondisi masing-masing, lalu melakukan perbaikan.

EPISODE  
MB

Sekilas  
**MERDEKA  
BELAJAR**

## Satuan Biaya BOP PAUD Tahun 2022 **Disesuaikan dengan Karakteristik dan Kebutuhan Daerah**

Mulai tahun 2022, nilai satuan biaya BOP PAUD bervariasi sesuai dengan perbedaan karakteristik dan kebutuhan antardaerah. Perhitungan BOP PAUD yang bervariasi itu dilakukan berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks Peserta Didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota.

**D**asar hukum kebijakan perubahan nilai satuan biaya BOP PAUD tahun 2022 adalah Keputusan Mendikbudristek Nomor 27/P/2022 tentang Satuan Biaya Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, dan BOP Pendidikan Kesenjangan Masing-Masing Daerah. Sebelumnya, dalam kebijakan BOP PAUD pada tahun 2021, berlaku satuan biaya yang sama untuk semua wilayah. Saat itu nilai satuan biaya per peserta didik per tahun adalah Rp600.000. Kemudian dalam kebijakan Merdeka Belajar ke-16, kini BOP PAUD tahun 2022 berlaku satuan biaya yang berbeda antardaerah, dihitung berdasarkan IKK dan IPD tiap wilayah kabupaten/kota.

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun dalam BOP PAUD tahun 2022 adalah Rp600.000 s.d. Rp1.200.000. Berdasarkan perhitungan IKK dan IPD, sebanyak 244 kabupaten/kota tidak mengalami perubahan satuan biaya BOP PAUD, sedangkan satuan biaya untuk 270 kabupaten/kota mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan 9,5 persen.

Misalnya di TK Negeri Pembina, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2021 besaran satuan

biaya BOP PAUD di TK tersebut sebesar Rp600.000 per peserta didik per tahun dan besaran alokasi sebesar Rp69.000.000 juta per tahun. Kemudian berdasarkan IKK dan IPD Kabupaten Kepulauan Anambas, pada tahun 2022 TK tersebut mendapatkan

tahun anggaran. Di tahun 2022, penerima dana BOP PAUD Reguler sudah ditetapkan melalui Kepmendikbudristek Nomor 28/P/2022 tentang Penerima Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan Tahun 2022.



Besaran alokasi dana BOP PAUD Reguler dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dana BOP PAUD pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah peserta didik. Pada satuan PAUD, tidak ada pembatasan jumlah minimal peserta didik. Penyaluran dana dihitung berdasarkan jumlah peserta didik di satuan PAUD berdasarkan cut off data tanggal 7 Desember 2021, berapa pun jumlah

satuan biaya sebesar Rp890.000 per peserta didik per tahun dan besaran alokasinya mencapai Rp102.350.000. Dengan begitu, TK Negeri Pembina Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat kenaikan satuan biaya sebesar 48 persen.

Bahkan di Provinsi Papua, kenaikan satuan biaya BOP PAUD bisa mencapai 100 persen. Di PAUD Lupuk, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua, satuan biaya pada tahun 2021 sebesar Rp600.000 per peserta didik per anak dan besaran alokasinya Rp16,2 juta per tahun. Kemudian di tahun 2022 satuan biayanya naik menjadi Rp1.200.000 per peserta didik per tahun dan besaran alokasinya menjadi Rp32.400.000 per tahun.

Penetapan dana BOP PAUD ditetapkan berdasarkan data tanggal 7 Desember 2021 dengan menggunakan validasi peserta didik sebagai dasar penetapan jumlah peserta didik penerima BOP PAUD. Penerima dana BOP PAUD ditetapkan dengan Keputusan Menteri setiap tahun anggaran dan penetapan dalam satu surat keputusan (SK) yang berlaku untuk satu

peserta didik. Perhitungan ini berlaku sama di semua kabupaten dan kota.

Komponen penggunaan dana BOP PAUD Reguler meliputi 10 hal, yaitu:

- a. penerimaan peserta didik baru;
- b. pengembangan perpustakaan/pojok baca;
- c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain;
- d. pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan satdik;
- f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK);
- g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan;
- j. pembayaran honor.

Pembayaran honor pada komponen penggunaan dana BOP PAUD diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. tercatat pada Dapodik;



2. ditugaskan oleh kepala satdik yang dibuktikan dengan surat penugasan/pengangkatan;
3. aktif melaksanakan tugas di Satuan PAUD; dan
4. belum memiliki gaji sebagai PTK dalam melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Satuan pendidikan penerima Dana BOP PAUD menentukan komponen penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Penggunaan Dana BOP PAUD untuk pengadaan barang dan/jasa dilaksanakan sesuai mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa oleh satdik (SIPLah). Dana BOP PAUD tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja dan kegiatan yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya operasional satuan pendidikan penyelenggara PAUD yang diselenggarakan pemerintah daerah yang tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima dana BOP PAUD menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, satuan pendidikan penyelenggara PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak ditetapkan sebagai penerima dan/atau tidak menerima dana BOP PAUD sehingga biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab badan hukum penyelenggara. **(DES)**





Penerima BOP Kian Dipermudah

## Dana Bantuan Ditransfer Langsung ke Rekening Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) maupun Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) kian dipermudah, mulai tahun 2022 ini dana BOP akan ditransfer langsung ke rekening mereka. Hal ini merupakan salah satu bentuk reformasi kebijakan untuk mempermudah penerima manfaat dan meningkatkan tata kelola penyaluran BOP. Harapannya satuan pendidikan penerima BOP dapat langsung membelanjakan dana bantuan tersebut untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikannya.

### Persyaratan Penerima BOP

**P**ersyaratan penerima BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yaitu satuan pendidikan wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan telah memutakhirkan data pokok pendidikan (Dapodik) sesuai kondisi riil di satuan pendidikan paling lambat pada 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya, satuan pendidikan juga harus memiliki izin penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan swasta serta memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan, dan tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.

Satuan pendidikan PAUD dan kesetaraan diimbau untuk memastikan validitas data mereka di Dapodik. Jumlah peserta didik yang dihitung sebagai dasar pemberian BOP merupakan peserta didik yang memiliki NISN.

Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang langsung ditransfer ke rekening sekolah tanpa melalui pemerintah daerah (pemda) merupakan perbaikan dari persoalan keterlambatan yang terjadi sejak 2019. Berdasarkan data yang dihimpun Kemendikbudristek, dana BOP PAUD dan Kesetaraan seluruhnya tidak diterima pada bulan April, melainkan ada keterlambatan hingga bulan Juli 2021. Hal tersebut diungkapkan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim saat peluncuran Merdeka Belajar episode ke-16 pada pertengahan Februari 2022.

Pada April 2021, dana BOP PAUD dan Kesetaraan baru diterima sebanyak 83 per a Mei 2021 bertambah sebesar 13 persen. Pada bulan Juni 2021 sebesar 3 persen dan terakhir pada Juli sebanyak 1 persen. Akibat keterlambatan itu sejumlah sekolah perlu menunggu waktu lama hingga mengharuskan kepala sekolah meminjam atau menalangi bantuan kepada orang

tua ataupun pihak ketiga. Hal tersebut tentu menjadi beban bagi kepala sekolah dan menghambat pelaksanaan program-program yang telah mereka susun.

Oleh karena itu, perubahan kebijakan ini akan menjawab persoalan dan mengurangi keterlambatan penerimaan dana BOP PAUD dan pendidikan kesetaraan. Kepala sekolah tidak perlu meminjam lagi untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakannya, karena dana BOP bisa cair tepat waktu.

### Ruang Lingkup Penggunaan Dana BOP

Ruang lingkup penggunaan dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan menjadi lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Sebelas komponen penggunaan dana BOP meliputi penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan dan layanan pojok baca, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen, dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan, pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan





langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyediaan alat multimedia pembelajaran untuk pendidikan kesetaraan, penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan pada PAUD, serta pembayaran honor.

Jika sebelumnya pembayaran honor hanya untuk pendidik, mulai tahun 2022 ini, pembayaran honor juga bisa untuk tenaga kependidikan. Pembayaran honor dapat mencapai 50 persen dalam kondisi normal dan tidak dibatasi alokasi maksimal jika terjadi bencana yang ditetapkan pemerintah daerah atau pusat.

Dalam kesempatan peluncuran Merdeka Belajar Episode 16, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alokasi dana BOP PAUD tahun 2022 mencapai Rp4,25 triliun untuk 6,9 juta anak-anak usia dini. Sementara itu, BOP Kesetaraan mencapai

Rp1,02 triliun yang akan diberikan kepada 587 ribu peserta didik.

Dana ini akan disalurkan secara langsung ke satuan pendidikan melalui 173 Kantor Pelayanan Penyelenggaraan Perbendaharaan Keuangan Negara. Menteri Keuangan mengapresiasi kebijakan tersebut. Penyaluran langsung ke rekening satuan pendidikan dapat memberikan kecepatan dan ketepatan di mana dana langsung bisa diterima oleh masing-masing satuan pendidikan tanpa adanya pungutan atau syarat-syarat yang kompleks. **(NWD)**





## Kolaborasi Pemerintah Ciptakan Fleksibilitas dalam Pengelolaan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Kebijakan akselerasi dan peningkatan pendanaan pendidikan memberikan perubahan positif, yakni nilai satuan biaya BOP PAUD yang bervariasi sesuai karakteristik daerah, penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan langsung ke satuan pendidikan, penggunaan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang fleksibel, serta perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan ARKAS sebagai aplikasi tunggal.

Pada tahun 2022, pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Penggunaan dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan menjadi lebih fleksibel karena disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Pengintegrasian pengelolaan dana BOS perlu dilakukan karena masih banyak aplikasi yang belum dikelola secara terintegrasi. Hal tersebut berdampak pada beragamnya referensi dan data yang ada, sehingga diperlukan pengintegrasian sistem, khususnya pada pengelolaan dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Total alokasi dana BOP PAUD tahun 2022 secara nasional sebesar Rp4,25 triliun untuk 6,5 juta anak di 4.138 satuan pendidikan PAUD. Sementara alokasi nasional untuk BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2022 sekitar Rp1 triliun yang ditujukan untuk 7.117 Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) aktif yang sesuai dengan kriteria. Alokasi tersebut ditujukan bagi 612.847 peserta didik valid penghitung besaran penerima.



Ruang lingkup penggunaan BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan sebelumnya mencakup tiga komponen yang pemanfaatannya dibatasi persentase untuk setiap komponen penggunaan, yaitu kegiatan pembelajaran dan bermain, paling sedikit 50 persen; kegiatan pendukung pembelajaran, paling banyak 35 persen; serta kegiatan lainnya (operasional), paling banyak 15 persen.

Di tahun 2022, terdapat 11 ruang lingkup komponen penggunaan dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan yang bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan satuan pendidikan, yaitu 1) penerimaan peserta didik baru; 2) pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca; 3) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; 4) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran; 5) pelaksanaan administrasi kegiatan satuan pendidikan; 6) pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan; 7) pembiayaan langganan daya dan jasa 8) pemeliharaan sarana dan prasarana; 9) penyediaan alat multimedia pembelajaran pada BOP Pendidikan Kesetaraan; 10) penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan pada BOP PAUD; serta 11) pembayaran honor.

Fleksibilitas penggunaan anggaran BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan yang dilakukan pada tahun 2022 mencakup soal ketentuan pembayaran honor. Jika sebelumnya pembayaran honor hanya untuk pendidik, maka akan berbeda dalam

implementasi kebijakan tahun 2022. Mulai tahun 2022, ketentuan pembayaran honor yaitu: dapat diberikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan; pembayaran honor maksimal 50 persen dalam kondisi normal; serta tidak dibatasi alokasi maksimal dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah.

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri Nomor 907-6479-SJ dan Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS, sekolah dan dinas pendidikan dapat lebih mudah mengelola dana BOS dengan penggunaan ARKAS dan MARKAS yang terintegrasi dengan SIPD. Sekolah mengelola ARKAS yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sedangkan, dinas pendidikan mengelola MARKAS yang terintegrasi dengan SIPD. Namun pengelolaan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di tahun 2022 masih melalui portal <https://bop.kemdikbud.go.id/> dan akan mulai menggunakan ARKAS/MARKAS pada tahun 2023.

Selama ini sistem pengelolaan anggaran sekolah masih terpisah dari sistem pengelolaan keuangan daerah. Sebelumnya, sekolah mengisi data perencanaan dan pelaporan anggaran secara manual pada sistem dari pemerintah daerah dan sistem dari pemerintah pusat. Akibatnya, sekolah menghabiskan waktu dan tenaga yang berlebih untuk keperluan administrasi.

Pada Februari 2022, Kemendikbudristek bersama Kemendagri mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang integrasi sistem pengelolaan anggaran sekolah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah, yaitu Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang menjadi aplikasi tunggal untuk sekolah dalam perencanaan dan pelaporan penggunaan Dana BOS. ARKAS juga terintegrasi dengan aplikasi sekolah lainnya. Kemudian Manajemen Aplikasi RKAS (MARKAS) menjadi aplikasi tunggal untuk Dinas



Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOS yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Perencanaan dan pengelolaan BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan tahun ini masih menggunakan aplikasi BOP Salur. BOP salur dan panduan penggunaannya dapat diakses melalui <https://bop.kemdikbud.go.id/>.

Penggunaan ARKAS/ MARKAS untuk BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan akan dimulai pada tahun 2023. Pada semester II tahun 2022 akan dilakukan piloting terbatas, sosialisasi dan bimbingan teknis lanjutan untuk PAUD dan Pendidikan Kesetaraan.

Terkait pengembangan ARKAS dan MARKAS untuk BOP, saat ini ARKAS/ MARKAS terus dikembangkan untuk mempermudah administrasi sekolah dan dinas pendidikan. Tim pengembang melakukan pembaruan tampilan agar lebih interaktif dan mudah digunakan. Alurnya juga dibuat lebih sederhana dan proses bisnisnya tersistematisasi sehingga pengisian dan format dokumen pelaporan keuangan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kemudian, pengintegrasian MARKAS dengan SIPD menerapkan sistem kodifikasi barang dan kegiatan sesuai dengan standar daerah serta penerapan standar satuan harga yang sifatnya uniform.

Manfaat yang diperoleh pemerintah daerah (pemda) atas pengintegrasian SIPD dengan ARKAS/MARKAS yaitu pemda tidak perlu menginput ulang RKAS dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada SIPD, proses penyusunan RKA dan DPA di dinas pendidikan menjadi lebih cepat, meminimalisir kesalahan dalam penginputan serta mempermudah akses sekolah pada referensi yang dibutuhkan seperti nomenklatur program/keg/subkeg/ akun dan standar harga.

Selain itu, pengintegrasian RKAS dan RKA di dinas pendidikan ke banyak platform tidak diperlukan karena cukup melalui MARKAS, mendorong transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan Anggaran Satuan Pendidikan berbasis teknologi informasi, serta sinkronisasi Laporan Realisasi Anggaran Dana BOS dengan Laporan Penggunaan Dana BOS per tahap sebagai syarat penyaluran tahap berikutnya menjadi lebih cepat. **(DLA)**





## ARKAS, Aplikasi Tunggal bagi Sekolah untuk Perencanaan dan Pelaporan Dana BOS

*Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sebagai aplikasi tunggal bagi sekolah digunakan untuk perencanaan dan pelaporan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Melalui ARKAS, sekolah cukup memasukkan informasi rencana dan anggaran ke satu aplikasi yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).*

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Februari 2022 telah meluncurkan aplikasi tunggal bagi sekolah yang digunakan untuk perencanaan dan pelaporan pengelolaan dana BOS, yaitu ARKAS. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan integrasi sistem pengelolaan anggaran sekolah dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengelolaan anggaran sekolah ini akan menyatu dengan sistem pengelolaan daerah. Selain itu, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dan Dapodik juga akan terhubung dengan SIPD.

ARKAS yang dipakai sekolah akan terintegrasi otomatis dengan Manajemen ARKAS (MARKAS), yaitu aplikasi tunggal bagi dinas pendidikan untuk mengelola dana BOS. MARKAS juga terintegrasi dengan SIPD Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jadi untuk sekolah menggunakan ARKAS, sedangkan untuk dinas pendidikan menggunakan MARKAS. Sebelumnya, sistem pengelolaan anggaran sekolah masih

terpisah dari sistem pengelolaan keuangan daerah. Dahulu, sekolah merencanakan dan melaporkan anggaran manual dua kali, yaitu pada sistem dari pemerintah daerah (pemda) dan pusat. Dampaknya, sekolah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk hal administratif.

Sebelumnya, terdapat beberapa aplikasi pengelolaan anggaran yang dipakai sekolah. Selain itu, format data dan standar acuan sebelumnya masih bervariasi. Kini, format data dan standar acuan sudah terstandarisasi sesuai aturan yang berlaku.

“

*Sekarang, kita pindah dengan satu aplikasi tunggal yang memudahkan proses bagi tiap sekolah. Dengan adanya ARKAS dan MARKAS, sekolah cukup memasukkan informasi rencana dan anggaran cukup ke satu aplikasi yang sudah satu dengan SIPD dan Dapodik” - Mendikbudristek Nadiem Makarim.*

Selain itu, proses persetujuan dokumen yang dahulu memakan waktu karena alurnya bervariasi.

Dengan kehadiran ARKAS, proses persetujuan dokumen jadi lebih cepat dengan adanya standardisasi dan otomatisasi alur. Sekarang ini, melalui kehadiran ARKAS dan MARKAS yang terintegrasi dengan SIPD, pengelolaan dana BOS bisa dilakukan dengan lebih akurat dan bertanggung jawab.

Proses konsolidasi anggaran sekolah ke dalam anggaran dinas sebelumnya dilakukan manual. Kini, proses ini dilakukan secara otomatis sehingga bisa menurunkan beban administratif sekolah dan dinas pendidikan. Diharapkan, kehadiran ARKAS dapat membantu pembuatan anggaran pendidikan menjadi lebih merdeka dan lebih efektif dalam perjalanan transformasi



Merdeka Belajar.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menilai ARKAS memberikan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang makin kuat. Menurutnya, ARKAS sebagai inovasi bertujuan untuk mempermudah pemerintah daerah dan pusat mengawasi dan membina PAUD dan pendidikan kesetaraan. Inovasi ini juga menciptakan kepercayaan publik karena APBN yang sangat besar untuk pendidikan harus menghasilkan kualitas pendidikan yang makin baik.

#### **Cara Menggunakan ARKAS dan MARKAS**

Agar sekolah dapat menggunakan ARKAS, dinas pendidikan harus terhubung ke

“

*Semoga ARKAS bisa mempercepat perbaikan pengelolaan pendidikan dan sekolah-sekolah makin ringan atau bahkan bebannya berkurang signifikan, dari mulai perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran dari anggaran pendidikan yang berasal dari BOS atau APBN” - Menkeu Sri Mulyani.*



MARKAS terlebih dahulu. Kemudian untuk mengakses MARKAS, dinas pendidikan dapat mengunjungi situs resmi Kemendikbudristek, yaitu: [rkas.kemdikbud.go.id](https://rkas.kemdikbud.go.id).

Lalu dinas pendidikan dapat memilih tombol “Login Dinas”, pilih “Daftar”, dan registrasi sesuai dengan data yang diminta. Setelah sukses login, maka MARKAS siap digunakan. Sekolah dapat mengunduh dan mengakses ARKAS dengan cepat dan mudah melalui laman [rkas.kemdikbud.go.id/download](https://rkas.kemdikbud.go.id/download).

Setelah masuk ke situs, sekolah kemudian memilih “Unduhan” dan klik “Unduh”. Setelahnya, sekolah dapat memasang (install) dokumen yang telah diunduh dan melakukan registrasi dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan menghubungi dinas pendidikan untuk mendapatkan kode aktivasi. Setelah mendapat kode, sekolah dapat melakukan login dan ARKAS pun siap digunakan.

Ketentuan terkait ARKAS tercantum dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 7 Tahun 2021 bersama

Menteri Dalam Negeri Nomor 907-6479-SJ tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS. Sosialisasi ARKAS kepada sekolah dan dinas pendidikan direncanakan berjalan Maret mendatang. Sebagai informasi, pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan untuk tahun 2022 ini masih melalui portal [bop.kemdikbud.go.id](https://bop.kemdikbud.go.id), serta ARKAS/MARKAS akan digunakan pada tahun 2023. Integrasi sistem melalui ARKAS dan MARKAS bertujuan mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional supaya pengelolaan dana BOS yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemda tidak perlu lagi menginput ulang RKAS dan RKA dinas pendidikan pada SIPD. Penggunaan ARKAS juga meminimalisasi kesalahan input data. **(DNS)**

### Hanya Akses Satu Portal

untuk Sekolah dan Dinas Pendidikan

<https://rkas.kemdikbud.go.id>

#### Sekolah

1. Pilih menu “**unduh**” pada <https://rkas.kemdikbud.go.id/>
2. Unduh dan instal file.
3. Lakukan **registrasi** dengan **NPSN** dan hubungi dinas pendidikan untuk dapatkan **kode aktivasi**.
4. Silakan login dan ARKAS siap digunakan.

#### Dinas Pendidikan

1. Pilih menu “**login dinas**” pada <https://rkas.kemdikbud.go.id/>
2. Klik “**daftar**” dan isi data untuk melakukan registrasi.
3. Lengkapi dan kirim data yang diperlukan.
4. Silakan login dan MARKAS siap digunakan.

### Dengan ARKAS dan MARKAS

Mengelola dana BOS jadi lebih mudah

**BOS**

- ✓ Sekolah cukup input ke satu aplikasi pengelolaan anggaran sekolah yang sudah terhubung dengan aplikasi daerah (SIPD) dan Dapodik.
- ✓ Format data dan standar acuan sudah mengacu pada regulasi yang berlaku.
- ✓ Proses persetujuan dipercepat dengan standarisasi dan otomatisasi alur.
- ✓ Proses konsolidasi anggaran sekolah ke dalam anggaran dinas terotomatisasi.



## Kemendagri Dukung Integrasi **ARKAS dan SIPD**

Ketentuan terkait integrasi ARKAS dan SIPD dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2021 bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 907-6479-SJ tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS. Melalui SEB tersebut, Kemendagri melalui pemerintah daerah mendorong seluruh satuan pendidikan untuk menerapkan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan Dana BOS melalui ARKAS dan SIPD.

**B**erlandaskan SEB Mendikbudristek dan Mendagri tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS, Kemendagri mendorong pemerintah daerah agar pengelolaan dana BOS bagi satuan pendidikan dapat menggunakan ARKAS, sedangkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pendidikan diharapkan dapat menggunakan MARKAS. Selain itu, kepala daerah melalui OPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan juga wajib melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan kepada satuan pendidikan di daerah masing-masing.

Bagi pemerintah daerah, integrasi ARKAS dan MARKAS memiliki beberapa manfaat. Setidaknya ada tujuh manfaat yang berdampak positif pada tata kelola pendataan di lingkup pemerintah daerah, yaitu: (1) pemerintah daerah tidak perlu menginput ulang RKAS dan RKA –Dinas pada SIPD, (2) mempercepat proses penyusunan RKA dan DPA dinas pendidikan, (3) meminimalisir kesalahan dalam penginputan, (4) mempermudah akses sekolah pada referensi yang dibutuhkan (nomenklatur program/keg/subkeg/akun dan standar harga),

(5) tidak perlu mengintegrasikan RKAS dan RKA Dinas ke banyak platform cukup pada MARKAS, (6) mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran satuan pendidikan berbasis teknologi informasi, dan (7) tercapainya sinkronisasi Laporan Realisasi Anggaran Dana BOS dengan Laporan Penggunaan Dana BOS per Tahap sebagai syarat penyaluran Tahap berikutnya.

Kementerian Dalam Negeri pun berkomitmen untuk menyediakan payung regulasi terkait pengelolaan BOP dan BOS melalui ARKAS. Selain itu, Kemendagri juga mengimbau pemerintah daerah agar

24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (ditetapkan 30 April 2020). Integrasi SIPD dan ARKAS juga bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel oleh Satuan Pendidikan pada pemerintah daerah. **(SEN)**

“

*Kami harap pemerintah daerah dapat memfasilitasi dinas pendidikan, baik provinsi/kabupaten/kota dan mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS menggunakan ARKAS” - Agus Fatoni.*

*Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.*

agar wajib melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan kepada satuan pendidikan di daerah masing-masing dalam melakukan pengelolaan Dana BOS melalui sistem ARKAS yang terintegrasi dengan SIPD.

Pengintegrasian SIPD dan ARKAS bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (ditetapkan 12 Juni 2019). Integrasi ARKAS dengan SIPD juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



# Akselarasi dan Peningkatan Pendidikan Pendanaan BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan

### 1. Apa yang dimaksud dengan dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan?

- Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional non- personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini.
- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non-personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Apa saja jenis Bantuan Operasional yang diberikan kepada satuan pendidikan di tahun 2022?

Bantuan operasional yang diberikan kepada satuan pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik antara lain:

- a. Dana BOP PAUD**, sasarannya adalah satuan PAUD yang meliputi taman kanak-kanak (TK), kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), sanggar kegiatan belajar (SKB), pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan satuan PAUD Sejenis (SPS). Dana BOP PAUD terdiri dari:
  - 1) BOP PAUD Reguler
  - 2) BOP PAUD Kinerja
- b. Dana BOS**, sasarannya adalah pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang meliputi SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK. Dana BOS terdiri dari:
  - 1) BOS Reguler
  - 2) BOS Kinerja
- c. Dana BOP Kesetaraan**, sasarannya adalah SKB dan PKBM.

### 3. Apa syarat satuan pendidikan penerima BOP PAUD Reguler TA 2022?

- a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan
- c. kondisi riil di satuan pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Khusus TA 2022 cutoff pengisian Dapodik diberikan dispensasi hingga tanggal 7 Desember 2021;
- d. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik; dan
- e. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.

#### 4. Apa syarat satuan pendidikan penerima BOS Reguler TA 2022?

- a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya;
- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- d. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan
- e. tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/ lembaga lain.

#### 5. Apa syarat satuan pendidikan penerima BOP Kesetaraan TA 2022?

- a. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan paling lambat 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. Khusus TA 2022 cutoff pengisian Dapodik diberikan dispensasi hingga tanggal 7 Desember 2021;
- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi satuan pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- d. memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik pada setiap jenjang; dan
- e. bukan merupakan satuan pendidikan kerja sama.

#### 6. Apa manfaat yang didapat dinas dan sekolah yang menggunakan ARKAS dan MARKAS?

##### Dengan MARKAS, dinas:

- a. Akan mendapatkan kemudahan administratif, utamanya terkait rekapitulasi keuangan sekolah.
- b. Akan dapat memiliki akses informasi anggaran sekolah pada satu platform sesuai dengan standar dan format SIPD.
- c. Akan dapat melaporkan pembelanjaan sekolah ke Pemda melalui SIPD sesuai siklus keuangan daerah.
- d. Dapat menyetujui permohonan perubahan dan pergeseran anggaran sekolah secara lebih mudah.

##### Dengan ARKAS, sekolah dapat:

- a. Memasukkan perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dana BOS secara lebih efisien.
- b. Merubah dan menggeser perencanaan dan penganggaran dana BOS secara lebih mudah.
- c. Melaporkan hasil realisasi belanja perencanaan dan penganggaran dana BOS secara lebih mudah.
- d. Mempercepat proses pelaporan penggunaan dana BOS secara efisien dan efektif.

#### 7. Bagaimana cara mengontak pusat bantuan ARKAS/MARKAS?

Apabila Anda baru pertama kali beralih ke ARKAS/MARKAS ataupun ingin mengetahui informasi seputar ARKAS/MARKAS, silahkan mengisi form ini di <http://bit.ly/FormBantuanARKAS>.

# Transformasi Kebijakan BOS 2020 dan 2021

*Menilik transformasi kebijakan BOS dua tahun ke belakang, telah banyak perubahan positif yang terjadi, terutama pada transparansi penggunaan dan pelaporan dana. Mulai 2020, pemerintah mewajibkan pelaporan penggunaan BOS sebagai persyaratan penyaluran. Hal tersebut berhasil mempercepat dan meningkatkan tingkat pelaporan*

Pada 25 Februari 2021, Kemendikbudristek yang saat itu masih dengan nomenklatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengumumkan kebijakan terkait skema penyaluran BOS dan DAK Fisik untuk 2021. Kebijakan anggaran tersebut merupakan kelanjutan dari Merdeka Belajar episode ketiga: Perubahan Mekanisme BOS Tahun Anggaran 2020 yang didukung Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas mekanisme penyaluran dan penggunaan dana BOS langsung ke rekening sekolah.

Saat mengumumkan kebijakan skema penyaluran BOS dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke sekolah sejak 2019 telah menerima

“

*Jadi ini cukup menggembirakan bagi kami karena IKK kami juga nilainya 1 sehingga dana BOS yang diterima oleh satuan pendidikan itu cukup banyak membantu khususnya dalam peningkatan kompetensi mereka” - Made Astika.*

tanggapan positif dan berhasil mengurangi tingkat keterlambatan dana sekitar 32 persen atau tiga minggu lebih cepat pada 2020 dibandingkan dengan 2019. Hal



tersebut sangat membantu para kepala satuan pendidikan dalam mengelola sekolah masing-masing, utamanya di masa awal pandemi Covid-19.

Pada September 2020 misalnya, 70 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1. Kemudian pada Desember 2020, 99 persen sekolah sudah melaporkan penggunaan BOS tahap 1. Artinya terjadi peningkatan drastis karena diterapkannya pelaporan secara daring (online).

Upaya transformasi lalu diperkuat dengan terbitnya Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler. Pokok-pokok kebijakan dana BOS 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS yang bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS yang tetap fleksibel, termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan pembelajaran tatap muka (PTM), serta pelaporan penggunaan dana BOS yang dilakukan secara daring melalui laman [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id).

Pelaporan secara daring menjadi syarat penyaluran demi meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS. Penerimaan laporan penerimaan tahap 1 menjadi dasar untuk sekolah menerima dana BOS untuk tahap 3, bukan tahap 2.

Pada 2021, pemerintah mengalokasikan Rp52,5 triliun dana BOS bagi 216.662 satuan pendidikan jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan SLB di Indonesia. Selain itu, mulai 2021 nilai satuan biaya operasional sekolah juga berbeda antardaerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota.

Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun jenjang SD rata-rata mengalami kenaikan 12,19 persen dengan satuan biaya Rp900.000 (terendah) s.d. Rp1.960.000 (tertinggi). SMP rata-rata kenaikan 13,23 persen dengan satuan biaya Rp1.100.000 (terendah) s.d. Rp2.480.000 (tertinggi). Kemudian untuk SMA rata-rata kenaikan

13,68 persen dengan satuan biaya Rp1.500.000 (terendah) s.d. Rp3.470.000 (tertinggi). SMK rata-rata kenaikan 13,61 persen dengan satuan biaya Rp1.600.000 (terendah) s.d. Rp3.720.000 (tertinggi). Sementara itu, Sekolah Luar Biasa (SLB) rata-rata kenaikan 13,18 persen dengan satuan biaya Rp3.500.000 (terendah) s.d. Rp7.940.000 (tertinggi).

“

***“Kami bersyukur bahwa diberikan kemerdekaan kepada sekolah untuk pemanfaatannya, jadi tidak bergantung kepada persentase, melainkan tergantung pada program prioritas di sekolah, yakni mana yang kita utamakan dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.” - Anwar Papilia.***

Kebijakan lainnya, untuk pembayaran honor dalam kondisi darurat bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, alokasi maksimal tidak dibatasi. Sementara, dalam kondisi normal, pembayaran honor adalah maksimal 50 persen untuk sekolah negeri dan swasta. Selain itu, honor juga dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih tersedia.

Kemendikbudristek berkomitmen untuk memberikan fleksibilitas bagi kepala sekolah untuk menentukan kebutuhan apa yang paling penting bagi sekolahnya di masa pandemi. Harapannya, satuan pendidikan langsung dapat mengambil keputusan cepat untuk mengatasi tantangan-tantangan yang sangat berbeda di tiap daerah. Oleh karena itu, kebijakan dana BOS saat itu sudah sepantasnya digunakan untuk memfasilitasi

berbagai kebijakan yang diambil satuan pendidikan dalam menyikapi perubahan dan tantangan sehubungan dengan persiapan PTM bertahap.

Di beberapa daerah, pengelolaan dana BOS telah dilakukan dengan perencanaan dan pengawasan yang baik. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Buleleng, Made Astika, menjelaskan bahwa timnya melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap dana BOS mulai dari tahap perencanaan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hal tersebut disampaikan dalam webinar Silaturahmi Merdeka Belajar: Transformasi Sekolah Melalui Dana BOS dan Asesmen Nasional pada 17 Februari 2022.

Di sisi lain, dengan adanya relaksasi pemanfaatan dana BOS, Made menilai sudah tepat karena membantu membayar membayar honor tenaga pendidik non-

“

***“Sebanyak 86,5 persen responden menilai kebijakan transfer langsung dana BOS ke rekening sekolah melalui Merdeka Belajar episode ketiga lebih memudahkan pihak sekolah.” - Nila Kirana.***

PNS. “Kebijakan yang diambil kementerian sudah cukup baik dan sangat meringankan sekolah dalam memanfaatkan dana bos sesuai dengan kebutuhan kami.”

Peneliti Litbang Kompas, Nila Kirana, memaparkan hasil survei yang dilakukan dalam kurun waktu 15–26 November 2021. Sebanyak 59,6 persen responden mengatakan Program Merdeka Belajar paling bermanfaat bagi pendidikan nasional. Sementara, 55,1 persen menyatakan penyaluran dana BOS langsung ke sekolah paling bermanfaat.



Sosialisasi penggunaan dana BOS oleh dinas pendidikan juga sudah dipahami dengan jelas oleh 83,7 persen responden.

Selanjutnya, sebanyak 59,4 persen responden menilai transfer dana BOS ke rekening sekolah setiap bulan sudah tepat waktu. Selain itu, sebanyak 67,4 persen responden mengakui tidak menemui kendala pada proses pencairan dana BOS. Mayoritas responden (99,2 persen) juga mengakui tidak ada pemotongan saat menerima dana BOS di luar biaya administratif.

Survei yang dilakukan Litbang Kompas melibatkan responden yang terdiri dari 503 orang guru dan kepala sekolah di 34 provinsi dengan rentang usia 25 hingga 69 tahun. Survei dilakukan dengan cara telesurvey/polling melalui telepon dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik systematic random sampling yang berasal dari basis data Kemendikbudristek.

**(DTA)**



**Dr. Elih Sudiapermana, M.Pd**

Praktisi Pendidikan Nonformal/Dosen  
Prodi Pendidikan Masyarakat Fakultas  
Ilmu Pendidikan UPI

Foto: Detik/Humas Pemkot Bandung

## Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan **Dorong Pengembangan Diri Satuan Pendidikan**

Sebagai praktisi pendidikan nonformal yang merupakan staf pengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Elih Sudiapermana mengapresiasi program ini. Menurutnya, secara konsep program ini bisa mendorong pengembangan diri satuan pendidikan. Berikut petikan wawancara tim redaksi majalah JENDELA dengan Elih Sudiapermana.

### **Bagaimana pandangan Bapak terkait kebijakan akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan?**

Pertama, apresiasi yang tinggi kepada pemerintah, terutama sudah menunjukkan sinergi antarkementerian dalam mengakselerasi penanganan suatu persoalan layanan dasar bagi publik, dalam hal ini pendanaan pendidikan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Kedua, apresiasi terhadap peningkatan BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan yang adaptif terhadap perbedaan persoalan daerah. Political will ini bisa menjadi bahan pijakan untuk ke depan agar benar-benar pemberian bantuan ini lebih inklusif memperhatikan karakteristik daerah, satuan pendidikan, bahkan karakteristik peserta didik.



**Menurut Bapak, apa yang perlu dioptimalkan agar program ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat lebih besar?**



Pertama, penyusunan RKAS memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang lebih fokus pada peningkatan kompetensi dan perkembangan peserta didik. Kedua, secara teknis memastikan integrasi ARKAS dan SIPD benar-benar memudahkan. Ketiga, perlu peningkatan kapasitas para pengelola keuangan yang terkait.

#### **Apa peran dinas pendidikan yang bisa membantu kelancaran dan penggunaan dana ini agar dapat berjalan dengan baik?**

Melakukan pembinaan satuan pendidikan sejak perencanaan kegiatan dan anggaran, pelaksanaan, dan pelaporannya. Monitoring selama proses pelaksanaan anggaran dan kegiatan penting dilakukan, bisa dengan menugaskan penilik yang ada di dinas pendidikan.

#### **Apa yang perlu dilakukan dan menjadi perhatian dinas agar satuan pendidikan dapat memanfaatkan program ini dengan baik?**

Memastikan RKAS disusun sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik. Program dan kegiatan sekolah diarahkan pada hal-hal yang prioritas untuk mengembangkan peserta didik.

#### **Menurut Bapak, sejauh mana program ini dapat membantu satuan pendidikan mengembangkan diri?**

Secara konsep, program ini harusnya mendorong pengembangan diri satuan pendidikan, terutama fleksibilitas penggunaan dana. Bagi ekosistem sekolah yang sehat, kebijakan ini sangat memberi ruang kreativitas pengembangan. Budaya pengelolaan sekolah yang partisipatif diperlukan untuk membuka ruang-ruang dialog di antara pemangku kepentingan.

#### **Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam pengelolaan dana ini bagi satuan pendidikan maupun dari dinas pendidikan?**

Kapasitas dan kompetensi SDM pengelola

keuangan di satuan pendidikan. Banyak daerah tidak memiliki penilik yang cukup, sehingga pemantauan dan pendampingan terhadap satuan pendidikan tidak bisa dilakukan secara efektif.

#### **Apakah pendanaan yang diberikan saat ini sudah sesuai atau sudah mencukupi kebutuhan satuan pendidikan?**

Jika kesesuaian dan kecukupan dilihat dari besaran jumlah bantuan, nampaknya sebagian besar belum cukup, ya. Tetapi secara kebijakan dengan adanya perbedaan antarwilayah dan fleksibilitas penggunaan, minimal sudah bisa mengurangi beban satuan pendidikan yang selama ini dihadapi.

#### **Menurut Bapak, kira-kira program apa yang saat ini belum ada, namun sebenarnya dibutuhkan untuk pengembangan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan?**

Untuk PAUD, utamanya adalah kualifikasi dan kompetensi pendidiknya. Pendidik PAUD nonformal yang kehadirannya lebih bersifat kerelawanan dan masih banyak yang berkualifikasi SMA/ sederajat. Untuk Pendidikan Kesetaraan, pertama, perhatian pemerintah terhadap peserta didik berusia 21 tahun ke atas. Kedua, hak pindah lintas jalur dan jenjang pendidikan sebagaimana dimungkinkan menurut UU Sisdiknas 20/2003. **(DES)**



## Kisah Inspiratif dari Mahasiswa Program Kampus Mengajar

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan adat dan budayanya. Banyaknya ragam adat yang ada di Indonesia, secara otomatis terdapat banyak masyarakat dan hukum adat yang akan berlaku dalam masyarakatnya. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia hingga saat ini masih ada yang belum berada dalam keadaan yang stabil, baik dari segi politik, hukum, budaya, maupun ekonomi. Namun terdapat juga masyarakat adat yang tetap berusaha menjaga kebudayaan dan kearifannya dengan baik, yaitu masyarakat hukum adat Bali.

Oleh karena itu, Mulyanto menulis Buku Pecalang: Kearifan Lokal Hukum Adat Bali. Melalui buku ini pembaca diajak untuk dapat memahami nilai-nilai budaya kearifan lokal yang dirawat oleh masyarakat hukum adat Bali. Sebagai daerah yang menjaga nilai-nilai kearifan dengan baik, kehadiran pecalang menjadi sangat penting dalam hal ini. Pecalang merupakan salah satu unsur lembaga adat pemerintahan desa pakraman yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adat.

Buku Pecalang terdiri dari 12 Bab pembahasan yang terdiri dari pendahuluan, keterkaitan nilai, asas, dan norma, konstitusional masyarakat hukum adat, nilai – nilai kearifan lokal di Desa Adat (Pakraman) Bali, Desa Pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali, implikasi undang – undang desa terhadap desa adat di Bali, anatomi pengaturan khusus desa adat dalam undang – undang desa, argumentasi pengaturan masyarakat hukum adat dalam undang – undang desa, keunikan model pemerintah dualitas desa di Bali, majelis utama Desa Pakraman (MUDP) Bali, penguatan pecalang sebagai polisi adat di Bali, dan penutup.

Buku ini tidak hanya cocok dibaca oleh



masyarakat hukum adat tetapi juga bisa dibaca oleh budayawan, peneliti budaya, maupun pemangku kebijakan untuk dapat merumuskan kebijakan terkait hukum adat yang ada di Indonesia agar damai berdampingan dengan masyarakat.

Kekurangan dari Buku Pecalang ini adalah banyak penggunaan bahasa undang – undang dan istilah yang tidak familier bagi pembaca khususnya masyarakat umum sehingga buku menjadi sulit dimengerti.

Informasi selengkapnya, buku dapat dibaca dan diunduh pada tautan [https://pustaka-digital.kemdikbud.go.id/slims/index.php?p=show\\_detail&id=3997&keywords=pecalang](https://pustaka-digital.kemdikbud.go.id/slims/index.php?p=show_detail&id=3997&keywords=pecalang) (RWT)



# EPerpusdikbud

**EPerpusdikbud** adalah layanan daring dari Perpustakaan Kemendikbudristek untuk peminjaman dan pengembalian koleksi digital yang telah dilanggan oleh Perpustakaan Kemendikbudristek.

Sudah mengunduh aplikasi, tapi **tidak bisa login/mendaftar** di EPerpusdikbud, yuk, ikuti langkah berikut:

Kirim pesan melalui posel **perpustakaan@kemdikbud.go.id** atau WhatsApp **082213740110** dengan format:

**Nama:**

**Alamat posel:**

**Perangkat yang digunakan:**

**Kronologis permasalahan:**

Tim Perpustakaan Kemendikbudristek akan melakukan pengecekan dan perbaikan. Selanjutnya silakan *login* kembali.



Hal yang **dilarang** dalam EPerpusdikbud :

- ♦ **Tangkap layar** isi koleksi EPerpusdikbud
- ♦ **Menyebarkan hasil tangkap layar** isi koleksi EPerpusdikbud







## Festival Film Indonesia 2022 Angkat Tema Perempuan

*Bertepatan dengan perayaan Hari Film Nasional tahun 2022, Komite Festival Film Indonesia (FFI) Tahun 2021-2023 meluncurkan Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2022 dengan mengangkat tema “Perempuan: Citra, Karya, dan Karsa”. Tema tersebut dipilih untuk merayakan andil besar perempuan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia.*

**P**enyelenggaraan Festival Film Indonesia (FFI) bukan sekadar melahirkan proses kompetisi, tapi juga sebagai peta untuk membaca dinamika perfilman Indonesia. Tema “Perempuan: Citra, Karya, dan Karsa” merupakan tema umum FFI 2022 dan tidak mengikat tema film-film yang akan berpartisipasi pada FFI tahun ini. Kata ‘citra’ pada tema melambangkan keindahan perempuan yang abadi; kata “karya” melambangkan ciptaan yang lahir; dan kata “karsa” melambangkan sumber kekuatan keindahan karya yang lahir dari perempuan

Sejalan dengan tema FFI tahun 2022 dan bertepatan dengan peluncuran Piala Citra 2022, empat perempuan dari industri perfilman Indonesia diumumkan sebagai Duta Festival Film Indonesia 2022. Keempat aktris berbakat itu masing-masing akan mewakili tema Perempuan: Citra, Karya, dan Karsa.

Pertama, Cut Mini, mewakili Citra, yakni potret perempuan Indonesia dari masa ke masa di perfilman Indonesia. Cut Mini merupakan pemenang Piala Citra kategori Pemeran Utama Perempuan Terbaik FFI 2016 dan kategori Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik FFI 2019. Kedua, Marsha Timothy, mewakili Karsa, yakni ruang aman untuk perempuan di industri perfilman Indonesia. Marsha Timothy merupakan pemenang Piala Citra

kategori Pemeran Utama Perempuan Terbaik FFI 2018.

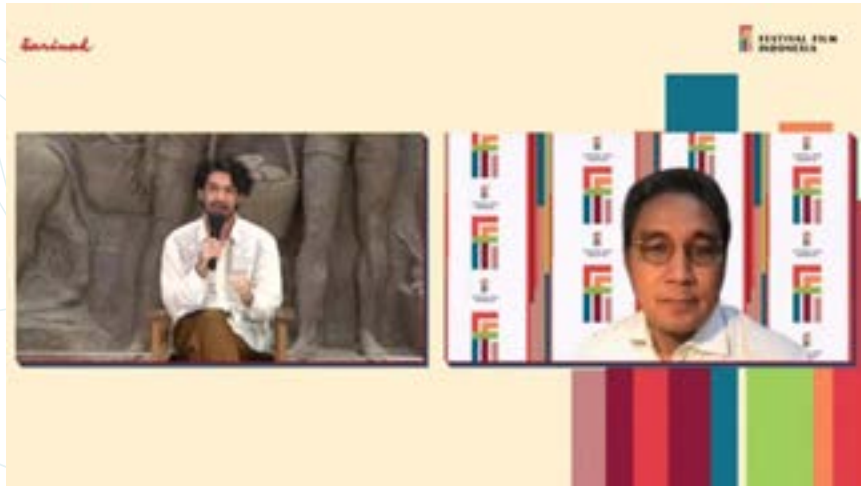
Ketiga, Prilly Latuconsina, mewakili Karya, yakni andil perempuan di balik layar perfilman Indonesia. Prilly Latuconsina merupakan pemenang Aktris Terfavorit Pilihan Penonton FFI 2021. Keempat, Shenina Cinnamon, mewakili Perempuan, yakni peran perempuan kini dalam ranah perfilman global. Shenina Cinnamon merupakan Nominator Pemeran Utama Perempuan Terbaik FFI 2021. Keempat

perempuan tersebut akan bertugas sebagai wajah FFI hingga malam anugerah atau malam puncak Piala Citra yang rencananya akan diadakan pada 22 November 2022.

“

***“Sejak dahulu, perempuan memegang peran penting upaya-upaya transformasi pada segala bidang, termasuk membuat perubahan besar dalam perfilman Indonesia. Baik mereka yang tampil di depan layar, maupun di belakang layar. Salah satu dinamika yang tergambar adalah andil besar perempuan dalam membangun ekosistem perfilman Indonesia.”- Mendikbudristek Nadiem Makarim.***

Ketua Umum FFI 2021-2023, Reza Rahadian, mengatakan, selain menjadi wajah FFI, para duta diharapkan dapat menjadi cerminan yang baik dan mendidik bagi perempuan Indonesia. Mereka juga akan terlibat di berbagai diskusi dan memperluas kesadaran lintas generasi tentang tema



FFI tahun ini, yaitu pentingnya eksistensi perempuan di perfilman Indonesia.

Pendaftaran FFI 2022 dibuka secara resmi mulai 30 Maret 2022, bertepatan dengan Hari Film Nasional. Pendaftaran akan dibuka hingga 31 Agustus 2022 untuk kategori Film Cerita Panjang dan 15 September 2022 untuk kategori Film Noncerita Panjang dan Kritik Film. Para pembuat film, produser, dan rumah produksi yang hendak berpartisipasi untuk mendaftarkan karya-karyanya dapat langsung mengunjungi situs resmi FFI, yaitu [www.festivalfilm.id](http://www.festivalfilm.id).

Untuk sistem penjurian, Komite FFI akan melanjutkan sistem hibrida yang sudah dilakukan sebelumnya, yakni dengan menggabungkan sistem juri nominasi dan sistem dewan juri akhir. Sistem penjurian FFI 2022 juga disempurnakan dengan pembentukan Akademi Citra FFI yang akan bertugas sebagai Juri Nominasi. Sistem penjurian merupakan sistem berjenjang dan komprehensif yang dirancang untuk masa kerja tiga tahun dengan berbagai penyempurnaan, salah satunya mengikuti perkembangan teknologi.

Komite FFI 2021-2023 terdiri dari Ketua Umum Reza Rahadian, Ketua Bidang Penjurian Garin Nugroho, Ketua Bidang Acara Inet Leimena, Ketua Sekretariat Linda Gozali, Bidang Humas Nazira C. Noer dan Emira P. Pattiradjawane, serta Ketua Bidang Keuangan dan Pengembangan Usaha Gita Fara. (ADW)



# TOLAK GRATIFIKASI!





G20 Bidang Kebudayaan

## Jalan Kebudayaan untuk Hidup yang Berkelanjutan

*Presidensi G20 Indonesia berimplikasi pada kepemimpinan Kemendikbudristek dalam Pertemuan Tingkat Menteri Kebudayaan G20 atau G20 Ministerial Meeting on Culture. Di bidang kebudayaan, Kemendikbudristek menawarkan sebuah konsep atau tema kepada dunia, yaitu “Jalan Kebudayaan untuk Hidup yang Berkelanjutan” atau “Culture for Sustainable Living”.*

**K**epemimpinan Kemendikbudristek pada bidang kebudayaan dalam Presidensi Indonesia di G20 mengangkat tema ‘Jalan Kebudayaan untuk Hidup yang Berkelanjutan’. Melalui tema tersebut, Indonesia mengajak negara-negara lain untuk merefleksikan diri dan memikirkan kembali kehidupan manusia dalam tatanan global yang dianggap masih jauh dari hidup yang berkelanjutan. Indonesia mengajak dunia agar bisa memanfaatkan kearifan lokal dengan baik untuk menjaga keberkelanjutan, termasuk di dalamnya lingkungan dan alam di mana manusia memanfaatkan sandang, pangan, dan papan.

Pada September 2022, Kemendikbudristek akan memimpin Pertemuan Tingkat Menteri Kebudayaan G20. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid akan berperan sebagai Koordinator (Coordinator of G20 Ministerial Meeting on Culture).

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid menyebutkan ada dua tujuan utama Kemendikbudristek dalam memimpin forum G20 di bidang kebudayaan. Pertama, membangun konsensus global untuk normal baru yang berkelanjutan. Kedua, menginisiasi

agenda pemulihan global melalui pembentukan jaringan aksi bersama di bidang kebudayaan. Sebelum diselenggarakannya G20 Ministerial Meeting on Culture, Kemendikbudristek menggelar rangkaian kegiatan G20 di bidang kebudayaan yang telah diawali dengan 1st Senior Officials Meeting (SOM) G20 pada April 2022. SOM G20 bidang kebudayaan diikuti oleh para delegasi dari negara anggota G20, negara undangan khusus, dan organisasi internasional secara daring.

Pertemuan pertama SOM G20 bidang kebudayaan fokus membahas peran budaya dalam mempromosikan kehidupan yang berkelanjutan. Pertemuan telah mengeksplorasi kemungkinan normal baru, yaitu transisi menuju kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi

pada keadilan sosial-ekologis berdasarkan keragaman sumber daya budaya.

Ada lima agenda yang dibahas pada pertemuan perdana SOM G20 bidang kebudayaan. Pertama, mengenai peran budaya sebagai pendorong kehidupan berkelanjutan. Kedua, tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari kebijakan berbasis budaya. Ketiga, tentang cultural commoning (pengelolaan bersama atas sumber daya budaya) yang mempromosikan gaya hidup berkelanjutan di tingkat lokal.

Keempat, akses yang berkeadilan untuk peluang ekonomi budaya. Kelima, mobilisasi sumber daya internasional yang untuk mengarusutamakan pemulihan berkelanjutan dengan menginisiasi suatu mekanisme pendanaan untuk pemulihan seni dan budaya yang sangat terpuakul selama pandemi.

Kemudian puncak dari G20 bidang kebudayaan adalah Ministerial Meeting on Culture yang akan diselenggarakan di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, pada 12 dan 13 September 2022. Pada pertemuan para Menteri Kebudayaan ini, Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan, antara lain Kirab Budaya, Rapat Raksasa, Konser G20, dan Ruwatan Bumi.



Kegiatan Ruwatan Bumi telah diawali dengan rangkaian Ruwatan Nusantara yang berlangsung di daerah-daerah di Indonesia. Ruwatan Nusantara yang pertama berlangsung pada Maret 2022 di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, melalui Upacara Bantaian Adat, yaitu salah satu upacara sedekah dengan memotong kerbau untuk dibagikan kepada masyarakat.

Sementara untuk kegiatan Kirab Budaya dan Rapat Raksasa rencananya akan dihadiri oleh tidak kurang dari 2.000 pelaku budaya, masyarakat adat, dan komunitas budaya. Sedangkan Konser G20 akan melibatkan kolaborasi musisi dari negara-negara G20. Selain itu, beragam kegiatan lain seperti Student Festival, Indonesia Bertutur, Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia, dan lainnya akan diselenggarakan untuk menyukseskan G20 bidang kebudayaan. **(DES)**



Mengulik Sekolah Rumah di Indonesia

## Ditilik dari Sisi Legalitas dan Pendekatannya

*Sekolah rumah dapat menjadi pilihan bagi orang tua untuk memenuhi pendidikan anak-anaknya. Jenis sekolah ini juga menjadi salah satu upaya pemecahan masalah pendidikan di masyarakat. Tapi tentu saja orang tua harus cermat dalam menilai legalitasnya dan bagaimana pendekatan yang semestinya.*

**K**eberadaan sekolah rumah (homeschooling) menjadi alternatif pendidikan nonformal yang dapat ditempuh peserta didik. Namun demikian tidak dapat dipungkiri masih ada kalangan masyarakat yang tidak mengenal apa itu sekolah rumah dan bagaimana praktik pembelajarannya. Tak jarang, kalangan tersebut merasa heran dengan perilaku orang tua yang tidak menyekolahkan anak di lembaga pendidikan formal.

Kecenderungan masyarakat umum yang menganggap bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan yang utama, berpandangan bahwa pendidikan hanya dapat diperoleh melalui sekolah yang kemudian menjadi sarana seseorang untuk memperoleh legalitas ijazah. Ijazah yang kemudian digunakan untuk mendapatkan pekerjaan tertentu dengan nominal penghasilan yang diinginkan. Pandangan tersebut melahirkan kultur yang menghubungkan-hubungkan antara kesuksesan dengan tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan formal



seseorang, semakin sukses pekerjaan dan penghasilannya.

Pertanyaan-pertanyaan tentang sekolah rumah tidak jauh dari perkara “kenapa tidak sekolah?”, atau “legal ya homeschooling itu?”. Isu legalitas dan bagaimana pendekatan pembelajaran inilah yang menarik untuk diulas dalam kajian ini.

Pendidikan keluarga disadari menjadi relevan dalam menopang kemajuan bangsa Indonesia. Gagasan-gagasan mengenai pentingnya membangun Indonesia melalui pembinaan keluarga perlu didukung bersama-sama. Tumbuh suburnya komunitas-komunitas keluarga, tentunya juga perlu memperoleh dukungan. Legalitas sekolah rumah sendiri menjadi bagian yang disebut dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31, yaitu memastikan setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak. Amanat tersebut diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang sekolah rumah.

Praktik sekolah rumah termasuk dalam jalur pendidikan informal. Kegiatan sekolah rumah diakui sebagai proses layanan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Kegiatan sekolah rumah diakui sebagai proses layanan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Tak ada sebuah definisi tunggal mengenai sekolah rumah, karena model yang dikembangkan sangat beragam.

Pendekatan (approach) dalam praktik sekolah rumah memiliki rentang yang lebar, antara model yang sangat tidak terstruktur seperti unschooling hingga yang sangat terstruktur seperti school at home. Berbagai ragam pendekatan pembelajaran yang digunakan di kalangan praktisi antara lain: (a) School at home, (b) Unit studies, (c) The Living Books, (d) Clasical, (e) Waldorf, (f) Montessori, (g) Unschooling, (h) Project based learning, dan (i) Eclectic.

Dalam kajian ini pun dikemukakan saran kepada pemerintah sebagai regulator yang mengatur sistem pendidikan nasional untuk membuat program-program unggulan dalam konteks pembinaan dan dalam rangka memfasilitasi tumbuh kembangnya keluarga-keluarga Indonesia melalui komunitas-komunitas keluarga. Pintu utamanya adalah dengan berupaya memahami cara pandang dan budaya lokal yang diyakini oleh komunitas sekolah rumah sehingga dapat menunjang berkembangnya potensi minat dan bakat anak, serta nilai-nilai kearifan lokal. **(ALN)**

#### **Sumber:**

*Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, Volume 14, Nomor 2/2021. Judul: Sekolah Rumah sebagai Salah Satu Bentuk Pendidikan Informal: Legalitas dan Ragam Pendekatan Pembelajarannya Penulis: Mohammad Siddiq, Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; dan Hartini Salama, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta*

<https://jurnalpuslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/index.php/litjak/article/view/508/211>



# IISMA Edisi Vokasi: Membentuk Mahasiswa Vokasi Berdaya Saing Global

*IISMA Edisi Vokasi merupakan salah satu implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mendanai mahasiswa vokasi Indonesia untuk belajar selama satu semester di kampus luar negeri sekaligus magang di industri yang menjadi mitra kampusnya. Dengan adanya IISMA Edisi Vokasi, diharapkan mahasiswa vokasi akan memiliki pengalaman belajar di lingkungan kampus yang berkaitan erat dengan dunia industri.*

**P**rogram IISMA Edisi Vokasi hadir untuk mendekatkan dunia pendidikan vokasi di Indonesia dengan dunia industri internasional. Program ini akan menjadi pemantik sekaligus jembatan bagi terciptanya lebih banyak kerja sama internasional di masa depan. Dengan semakin banyaknya mahasiswa vokasi ke berbagai institusi pendidikan di luar negeri, diharapkan mahasiswa dapat mengetuk pintu dan membuka jalan kerja sama dengan berbagai industri internasional.

Program IISMA Edisi Vokasi dibuka bagi semua mahasiswa vokasi jenjang Diploma III (D-3) dan Diploma IV (D-4) dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Tahun 2022, program IISMA Edisi Vokasi menyediakan kuota sebanyak 400 mahasiswa yang ingin belajar di luar negeri. Hingga saat ini, lebih dari 100 perguruan tinggi vokasi di Indonesia telah siap mendaftarkan mahasiswanya untuk bergabung dalam program IISMA Edisi Vokasi.

Syarat utama untuk bisa berpartisipasi dalam IISMA Edisi Vokasi adalah warga negara Indonesia (WNI) yang terdaftar sebagai mahasiswa vokasi pada perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Bagi mahasiswa program D-3 dapat mendaftar pada saat semester III. Sementara itu, bagi mahasiswa program D-4 dapat mendaftar saat semester IV atau semester VI. Selain itu, mahasiswa vokasi yang akan mendaftar IISMA Edisi Vokasi harus memiliki sertifikat bahasa Inggris. Beberapa negara

juga menghendaki sertifikat internasional seperti TOEIC, Duolingo, dan TOEFL. Negara-negara yang telah mendukung program IISMA yaitu Inggris, Jerman, Korea Selatan, Jepang, Malaysia, dan Australia.

Ada sepuluh bidang yang menjadi prioritas pada IISMA Edisi Vokasi yakni bidang industri perhotelan dan pariwisata; bidang rekayasa; bidang teknologi informasi; bidang bisnis dan manajemen; bidang akuntansi; bidang kelautan dan maritim; bidang pengelolaan air; bidang pertanian; bidang industri kreatif; serta bidang hubungan masyarakat.

Selama mengikuti program ini, para mahasiswa tidak hanya mengembangkan kompetensi teknis yang spesifik berhubungan dengan jurusannya, tapi juga keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam kelompok, dan hal-hal lainnya yang sulit dikembangkan jika hanya belajar dalam kelas.

Melalui program IISMA Edisi Vokasi, Kemendikbudristek bertindak sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program IISMA Edisi Vokasi di berbagai negara Eropa dan Asia. Program diharapkan dapat menjadi bekal pengalaman dan kemampuan untuk mendorong lebih banyak inovasi karya anak bangsa.

Saat peluncuran IISMA Edisi Vokasi,

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa program ini ditujukan untuk melahirkan calon-calon pemimpin yang menguatkan posisi Indonesia di panggung internasional. Selain itu, IISMA Edisi Vokasi juga menjadi upaya pemerintah dalam menghilangkan sekat-sekat antara pendidikan vokasi dengan industri. Menurutnya, internasionalisasi pendidikan menjadi keharusan jika Indonesia juga ingin berperan serta mendapat manfaat dari globalisasi. Hal itu juga berlaku bagi mahasiswa pendidikan vokasi yang kelak akan bekerja di industri terkemuka dunia. Ke depannya, program ini diharapkan juga dapat diikuti oleh para dosen perguruan tinggi vokasi.

Informasi lebih lanjut mengenai program dan pendaftaran dapat diakses melalui laman [ivosma.kemdikbud.go.id](https://ivosma.kemdikbud.go.id). Selain itu, Kemendikbudristek menyediakan informasi terbaru terkait program melalui akun media sosial IISMA di Instagram, Youtube, dan LinkedIn. **(PRM)**







## Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu

### Sejarah

**S**ebelum pelaksanaan Kongres Pemuda (1928), tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara mengemukakan pemikirannya tentang pemilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Berikut kutipannya; “Bahwa yang dinamakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu yang sungguhpun pokoknya berasal dari Melayu Riau, akan tetapi yang sudah ditambah, diubah, atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru, hingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia; pembaruan bahasa Melayu hingga kini menjadi bahasa Indonesia itu harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baru, ialah alam kebangsaan Indonesia”.

Menilik sejarahnya, bahasa Indonesia diakui termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Riau. Pada masa itu, penggunaan dan kedudukan bahasa Melayu berada pada posisi sangat penting dan strategis, baik dalam lintas perdagangan, relasi sosial, seni budaya, dan

ketika pertama kali masuknya penyebaran agama-agama besar di Indonesia. Awalnya, pusat kerajaan Melayu berada di Malaka, kemudian pindah ke Johor. Pada tahun 1719, pusat kekuasaan Istana Kerajaan Johor dipindahkan ke Ulu Riau, tepatnya di Pulau Bintan. Sejak itulah Riau dikenal sebagai pusat Kerajaan Melayu. Pemindahan tersebut juga menjadi babak permulaan pengembangan dan penyebaran bahasa Melayu. Pada akhir abad ke-19, setidaknya ada dua kelompok bahasa Melayu yang berlaku di masyarakat Nusantara, yaitu bahasa Melayu Pasar yang sifatnya terbuka dan tidak baku dan bahasa Melayu Tinggi yang biasa dipergunakan oleh kalangan bangsawan.

Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa pengantar (lingua franca) yang sehari-hari digunakan oleh para penjual dan pembeli di sebagian besar kepulauan Nusantara serta kawasan Asia Tenggara. Demi kepentingan berkomunikasi di masa itu, hampir seluruh bangsa asing dari



berbagai belahan benua pun menggunakan bahasa yang sama. Pada tahun 1824, pemerintah kolonial Inggris dan kolonial Belanda melakukan sebuah persetujuan dan melahirkan Traktat London 1824 (London Treaty of 1824). Perjanjian tersebut memutuskan kawasan Nusantara dibagi menjadi dua bagian. Kepulauan Indonesia, Kerajaan Riau, dan Lingga berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Sementara itu, Semenanjung Malaya, Singapura, Kerajaan Johor dan sekitarnya berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris.

Keadaan tersebut secara tidak langsung berdampak pada penggunaan bahasa di wilayah masing-masing. Puncaknya, memasuki abad 20, ejaan bahasa Melayu terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Melayu Hindia Belanda yang mengacu pada ejaan Van Opujsen dan bahasa Persekutuan Tanah Melayu di bawah Inggris mengacu pada ejaan Wilkinson.

### **Internasionalisasi Bahasa Indonesia**

Upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, khususnya menjadi bahasa resmi kedua di ASEAN mempunyai potensi besar karena perkembangan bahasa Indonesia semakin pesat. Berdasarkan data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, jumlah penutur bahasa Indonesia mencapai 280-an juta orang yang meliputi: 269 juta penutur di Indonesia, 2 juta penutur di Amerika dan Eropa, 2,4 juta penutur di Asia Pasifik dan Afrika, dan 5,2 juta penutur di Asia Tenggara. Selain itu, jumlah peminat bahasa Indonesia juga semakin bertambah dengan melihat jumlah pemelajar BIPA (Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) yang telah mencapai 142.484 orang di 47 negara. Hal itu diiringi dengan bertambahnya jumlah lembaga penyelenggara program BIPA di dunia yang mencapai 428 lembaga.

Upaya lainnya adalah melalui pengajaran bahasa Indonesia sebagai mata kuliah di sejumlah kampus kelas dunia di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia, serta beberapa perguruan tinggi terkemuka di

Asia.

Aspek lainnya adalah dengan melihat kekayaan kosakata yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) cetak Edisi I (1988) terdapat kurang lebih 62.000 lema dan bertambah menjadi kurang lebih 108.000 lema pada KBBI cetak Edisi V (2016). Perkembangan lebih signifikan dapat dilihat melalui KBBI daring yang dimutakhirkan setahun dua kali yang saat ini memiliki kurang lebih 116 ribu lema.

Secara ilmiah, bahasa Indonesia juga telah mempunyai tiga acuan dasar, yaitu tata bahasa baku, pedoman ejaan, dan KBBI sehingga akan memudahkan siapa pun yang belajar bahasa Indonesia dengan mengacu pada tiga acuan tersebut untuk memahami lebih dalam. Belum lagi adanya Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai alat uji untuk mengukur tingkat keterpahaman bahasa Indonesia seperti halnya TOEFL bahasa Inggris.

Sementara itu, bahasa Melayu di Indonesia merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki beberapa varian dialek berdasarkan wilayah sebarannya, seperti Medan, Jambi, Jakarta, dan Ambon. Jadi, meskipun bahasa Indonesia dilahirkan dari bahasa Melayu, secara linguistik bahasa Indonesia saat ini sudah berbeda dari bahasa Melayu, baik dari segi struktur, tata bahasa, maupun dari jumlah kosakatanya. Dan dalam perkembangannya bahasa Indonesia diperkaya oleh berbagai bahasa daerah di Indonesia, khususnya Jawa, Minangkabau, dan Sunda dan dari bahasa asing, seperti Inggris, Arab, Belanda, Portugis, Spanyol, dan Cina. **(ANW)**

\*lema: kata atau frasa masukan dalam kamus di luar definisi atau penjelasan lain yang diberikan dalam entri

Sumber: [badanbahasa.kemdikbud.go.id](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id)

# UNIT LAYANAN TERPADU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



Gedung C, Lantai 1,  
Kompleks Kemendikbudristek  
Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta, 10270



Pusat Panggilan : 177

Posel : [pengaduan@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id)

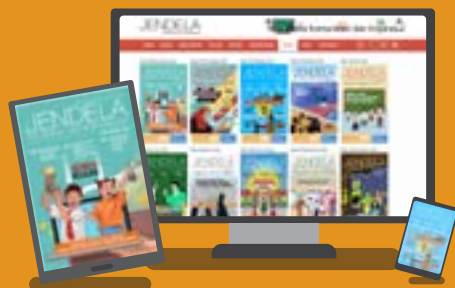
Laman : [ult.kemdikbud.go.id](http://ult.kemdikbud.go.id)



Anda dapat mengakses Majalah Jendela  
secara daring melalui:

 [jendela.kemdikbud.go.id](http://jendela.kemdikbud.go.id)

**Majalah Jendela**





# SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA

1 JUNI 2022

ISSN: 2502-7967



9 772502 786065